



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PENGADILAN NEGERI KOTABARU  
KELAS II  
Jl. Jamrud 1 - Kotabaru**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA SATKER : **PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II**  
 TAHUN : **2019**

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II telah melakukan pengukuran keberhasilan suatu kinerja utama yang bersesuaian dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diamanahkan sehingga dapat dimanfaatkan, dan Pengadilan Negeri telah mereviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Review RENSTRA Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 yang selengkapnya tergambar sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana  b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
			$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada tahun berjalan</p>		Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum :Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>			
	<p>e. Persentase perkara pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah perkara pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara pidana Anak}}{\text{Jumlah perkara pidana Anak}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:  Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan  Dan  Laporan Tahunan</p>	
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan  Dan  Laporan Tahunan</p>	

2.	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>X 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam</p>	<p>Jumlah Perkarayang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang mohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
			<p>Jumlah Perkara Tipikor yang di upload dalam website</p> <p>Jumlah Perkara Tipikor yang di Putus</p> <p>X 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	waktu 1 hari setelah diputus	<p>a. Persentase perkara yang di selesaikan secara prodeo (pembebasan biaya)</p> <p>Jumlah perkara prodeo yang di selesaikan _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara prodeo</p> <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.		<p>b. Persentase perkara yang di selesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara yang di selesaikan diluar Gedung Pengadilan _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya di selesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar Gedung Pengadilan Adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Layanan Hukum (posbakum)</p>	<p>Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum _____ X 100%</p> <p>Jumlah pencari keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

KETUA



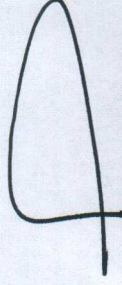
DARWANTO, S.H.MH.  
NIP. 19730319 199303 1 003

PANITERA



LINDA, SH  
NIP. 19690520 198303 2 001

SEKRETARIS



FITRIYADI, SH  
NIP. 19691106 199005 1 001